

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelang dan memasuki milenium baru terjadi perubahan-perubahan yang signifikan sebagai faktor pendorong bagi organisasi untuk melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian internal untuk mengantisipasi berbagai perubahan kondisi eksternal. Perubahan maupun penyesuaian internal tersebut dimaksudkan untuk bersikap proaktif dalam mengantisipasi kondisi turbulen dimasa kini dan masa yang akan datang Tingkat akselerasi turbulensi tidak hanya dihasilkan dari persaingan ekonomi yang semakin menggelobal dan kemajuan dramatis di bidang tehnologi, tetapi juga diakibatkan oleh semakin meningkatnya perubahan-perubahan fundamental di dalam tata sosial itu sendiri (Aughton, 1996, dalam Darsono, 2002). Perubahan-perubahan yang signifikan tersebut merupakan faktor pendorong bagi organisasi untuk melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian internal untuk mengantisipasi dari berbagai perubahan kondisi eksternal.

Faktor kritis yang berkaitan dengan keberhasilan jangka panjang organisasi adalah kemampuannya untuk mengukur seberapa jauh kemampuan organisasi melakukan adaptasi perubahan lingkungan untuk memastikan bahwa

1.1.1. Organisasi memiliki standar saat ini (current) dan selalu meningkat

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dikatakan telah memasuki babak baru setelah diundangkannya UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999. Kedua undang-undang tersebut memuat berbagai ketentuan yang memberikan peluang sangat besar kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif di seluruh bidang kehidupan, dimana didalamnya diletakkan norma-norma demokrasi penyelenggaraan pemerintahan. Dasar-dasar pemikiran yang digunakan adalah menyangkut pendelagasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan demokratisasi di bidang pemerintahan yang diwujudkan dengan desentralisasi kekuasaan secara besar kepada daerah otonom, Rasyid (1996).

Dengan adanya perubahan sistem pemerintahan daerah dari sistem yang cenderung sentralistik ke sistem yang lebih desentralistik tersebut, sudah barang tentu akan mempengaruhi pola dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di daerah mulai dari perencanaan sampai pengawasan. Berbagai sifat yang semula bersifat *top down* menjadi tidak populer lagi dan digantikan oleh pola *bottom up* yang dipandang sangat demokratis. Pola dan mekanisme seperti ini akan mempengaruhi aktivitas manajemen pemerintahan, sehingga dalam pelaksanaannya, penerapan otonomi daerah masih banyak diliputi beberapa masalah seperti berbagai tuntutan masyarakat yang tidak masuk akal bagi pemerintah daerah, euforia politisi daerah, sumber daya manusia yang belum siap, sumber pendanaan yang kurang dan sebagainya. Kondisi di atas berarti menggambarkan bahwa lingkungan organisasi pemerintah daerah sedang

Ada beberapa elemen yang menjadi target atau sasaran dari setiap perubahan organisasional, yaitu *organization structure*, *tehnology*, dan *people* (Greenberg dan Baron, 2000, dalam Darsono, 2002). Dari ketiga elemen tersebut, elemen yang paling penting adalah *people*, karena merubah *people* sama artinya dengan merubah budaya. Model atau pendekatan baru perlu dikembangkan untuk memandang manajemen perubahan sebagai suatu model alternatif lebih sebagai suatu improvisasi berkelanjutan daripada suatu tahapan yang statis (Orlikowski dan Hofman, dalam Darsono, 2000). Model ini untuk mengelola perubahan teknologi informasi didasarkan pada riset yang dilakukan terhadap implementasi dan penggunaan teknologi informasi.

Hasil penelitian yang dilakukan Primiana (2002), terhadap beberapa organisasi di Indonesia khususnya BUMN untuk mengetahui apakah telah terjadi perubahan akibat tuntutan global menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan, Hal ini berarti bahwa nilai tambah yang diharapkan dari upaya untuk memperbesar tingkat keberhasilan pelaksanaan TQM pada tingkatan yang lebih tinggi relatif terbatas.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa struktur organisasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul hendaknya harus dapat lebih efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut penting mengingat kegiatan penciptaan nilai oleh anggota organisasi tidak akan berarti tanpa adanya tipe struktur organisasi yang sesuai yang akan menjelaskan tugas dan hubungan kegiatan dari bermacam orang dan fungsi (Galbraith, 1973, dalam Mesquita, 2000). Hal tersebut didukung oleh

hasil penelitian Chandler dalam *Strategy and structure*, (dalam Masyita, 2000), bahwa struktur akan mengikuti strategi. Penelitian tersebut dipertegas pula oleh hasil penelitian Christensen *et al*, (dalam Masyita, 2000) yang menegaskan bahwa struktur harus mengikuti strategi, dimana strategi merupakan sebuah integrasi dari tujuan perusahaan, sifat dasar, kompetensi perusahaan, dan kesempatan serta resiko dari perubahan lingkungan.

Studi lainnya yang berkaitan dengan pengembangan organisasi adalah studi yang dilakukan oleh Burn dan Stalker, Lowrennce dan Lorsch serta Woodward dalam Masyita (2000) yang telah mengidentifikasi pendekatan kontingensi yang menggunakan faktor teknologi dan pasar dapat mempengaruhi struktur dan efektifitas organisasi.

Bertolak dari hasil temuan tersebut sebaiknya dengan struktur organisasi yang sudah ada, teknologi yang telah tersedia serta perangkat perundangan tentang pelaksanaan otda yang sudah diterapkan, maka instansi pemerintah Kabupaten Bantul seharusnya dapat memberi pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efektif dan efisien. Sebagaimana kita ketahui bahwa dasar-dasar pemikiran yang digunakan dalam otonomi daerah adalah menyangkut pendelegasian wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dan demokratisasi di bidang pemerintahan yang diwujudkan dengan desentralisasi kekuasaan secara luas kepada daerah otonom, Rasyid (1996).

Untuk mendukung harapan tersebut pihak manajemen instansi pemerintah kabupaten Bantul dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas karena peran dari struktur organisasi merupakan landasan bagi manajemen

mampu mengkoordinasikan kegiatan dari bermacam-macam fungsi atau divisi agar mengeksploitasi keahlian dan kemampuan anggotanya.

Berdasarkan dari uraian yang telah dijelaskan di muka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Perubahan Struktur Organisasi, Perubahan Perilaku, Perubahan Sistem Prosedur dan Tehnologi, Serta Tekanan Eksternal-Internal Terhadap Keberhasilan Pengembangan Organisasi dalam Rangka Pemberlakuan Otonomi Daerah di Kabupaten Bantul”.

1.2 Perumusan Masalah

Bertolak dari beberapa fenomena tersebut, maka dapat dirumuskan :

1. Apakah perubahan struktur organisasi, perubahan sistim/prosedur dan teknologi, perubahan perilaku organisasi dan tekanan intemal-eksternal organisasi, baik secara bersama-sama maupun individual (*partial*) berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengembangan organisasi.
2. Variabel manakah dari perubahan struktur organisasi, perubahan sistim/prosedur dan teknologi, perubahan perilaku organisasi dan tekanan intemal-eksternal organisasi yang dominan berpengaruh terhadap keberhasilan pengembangan organisasi.

1.3 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Instansi

1. Memberikan masukan kepada instansi mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan organisasi, khususnya organisasi Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul berdasarkan prioritas faktor yang paling berpengaruh.
2. Memberikan informasi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul tentang langkah-langkah sistimatis dalam usaha pengembangan organisasi.
3. Bagi ilmu pengetahuan, penulisan ini diharapkan dapat menambah khasanah bacaan di perpustakaan atau bagi pihak yang membutuhkan.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penulisan ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan dari variabel perubahan struktur organisasi, perubahan sistim/prosedur dan teknologi, perubahan perilaku organisasi dan tekanan intemal-eksternal organisasi secara bersama-sama (*simultant*) dan individual (*partial*) terhadap keberhasilan pengembangan organisasi di Instansi Pemerintah Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui pengaruh yang paling dominan dari variabel perubahan struktur organisasi, perubahan sistim/prosedur dan teknologi, perubahan perilaku organisasi dan tekanan intemal-eksternal organisasi terhadap keberhasilan pengembangan organisasi di Instansi Pemerintah Kabupaten

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan berbagai hal yang meliputi : latar belakang penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.
- Bab II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis, menjelaskan mengenai landasan teori yang mendasari pembahasan dalam penulisan tesis mulai dari teori-teori yang mendasari variabel yang diteliti yakni variabel perubahan struktur organisasi, perubahan sistem/prosedur dan teknologi, perubahan perilaku, tekanan internal/eksternal dan variabel keberhasilan pengembangan organisasi. Di samping itu juga menjelaskan berbagai hasil penelitian terdahulu yang dapat mendukung penelitian ini dan pengembangan hipotesis.
- Bab III Metode Penelitian, menjelaskan berbagai prosedur penelitian yang akan dilalui yang meliputi populasi, sampel, tehnik pengambilan sampel, pengumpulan data, uji instrumen dan alat uji hipotesis.
- Bab IV Analisis dan Pembahasan, menjelaskan hasil analisis yang meliputi uji instrumen, analisis deskriptif, analisis regresi, dan pembahasan.
- Bab V Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran, menjelaskan kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis yang telah dilakukan dalam bab-bab sebelumnya yang selanjutnya akan disampaikan beberapa keterbatasan yang ada dan juga akan diberikan beberapa rekomendasi
- Bab VI Implikasi Hasil Penelitian, menjelaskan temuan-temuan yang terjadi pada instansi Pemerintah Kabupaten Pantul